

BAB II

LANDASAN TEORI

Dalam mendukung penelitian ini, terdapat beberapa teori yang kemudian menjadi landasan pemikiran paradigmatik penelitian. Teori mengenai ketimpangan pendapatan menjadi teori awal kemudian teori tentang jumlah penduduk, partisipasi angkatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi sebagai teori pendukung variabel yang digunakan. Untuk penjelasan teori yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

A. Teori Ketimpangan

Ketimpangan pembangunan tercermin dalam berbagai aspek, baik dalam proses maupun hasil. Dari segi hasil, ketimpangan tercermin dari segi ketimpangan pendapatan. Sedangkan dalam segi proses, tercermin dari bentuk ketimpangan pelaksanaan/kegiatan pembangunan. Ketimpangan dapat dilihat dari masih banyaknya perkampungan kumuh, desa tertinggal, dan masyarakat miskin, sedangkan disisi lain banyak masyarakat hidup dalam kemewahan (Suryana dan Kusnendi, 2007: 20).

Pemerataan pendapatan atau distribusi pendapatan nasional mencerminkan merata atau tidaknya pembangunan suatu negara. Secara teoritis, ada tiga konsep untuk mengukur distribusi pendapatan yang lazim digunakan, yaitu kurva Lorenz, rasio gini, dan kriteria yang digunakan oleh bank dunia (Dumairy, 1996).

Pemerataan pendapatan atau distribusi pendapatan nasional mencerminkan merata atau tidaknya pembangunan suatu negara. Secara teoritis, ada tiga konsep untuk mengukur distribusi pendapatan yang lazim digunakan, yaitu kurva Lorenz, rasio gini, dan kriteria yang digunakan oleh bank dunia. Indeks atau rasio gini adalah suatu koefisien yang menjelaskan tingkat ketimpangan atau pemerataan distribusi pendapatan nasional. Koefisien rasio gini bergerak pada angka 0-1. Semakin kecil angka koefisien gini maka atau mendekati 0 maka semakin merata distribusinya. Sebaliknya, semakin besar angka koefisien gini atau mendekati 1 maka artinya semakin timpang atau tidak merata distribusi pendapatannya. Angka koefisien gini bukanlah angka mutlak untuk mengukur besar ketimpangan, tapi dengan koefisien gini dapat menjelaskan secara umum gambaran dalam pembagian pendapatan (Dumairy, 1996). Rasio gini dapat dihitung dengan rumus:

$$G = 1 - \sum_{i=1}^n (X_i - 1 - X_i) (Y_i - Y_i - 1)$$

$0 < G < 1$

$$G = 1 - \sum_{i=1}^n f_i (Y_i - Y_i - 1)$$

Keterangan :

G = rasio gini

f_i = proporsi jumlah rumah tangga dalam kelas-i

X_{i+1} = proporsi jumlah kumulatif rumah tangga dalam kelas- i

Y_{i+1} = proporsi jumlah kumulatif pendapatan dalam kelas- i

Menurut Quraish Shihab dalam bukunya Noor Ruslan Abdul Ghofur (2013) menyatakan bahwa distribusi pendapatan berhubungan dengan keadilan dalam pendapatan. Keadilan merupakan kata sifat yang merupakan perbuatan, perbuatan adil, dan tidak berat sebelah. Setidaknya ada empat makna keadilan, yaitu:

Pertama, kata „*adl* dalam arti “seimbang”. Pengertian ini dapat dilihat dalam Q.S. Al Infithar (82): 7. Pada ayat Al Inthifathir dijelaskan bahwa keadilan dalam arti “keseimbangan” menimbulkan keyakinan bahwa ALLAH SWT Maha bijaksana dengan menciptakan ciptannya dengan ukuran, kadar, dan waktu tertentu guna mencapai tujuan serta mengantarkan pemahaman pada pengertian “keadilan Ilahi”.

Kedua, kata „*adl* dalam artian “perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya”. Pengertian inilah yang diartikan dengan “menempatkan sesuatu pada tempatnya”.

Ketiga, kata „*adl* dengan artian “yang dinisbahkan kepada ALLAH SWT”. Dalam artian ini mempunyai maksud memelihara kewajaran atas berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk itu.

Dan yang terakhir „*adl* dalam arti “sama”. Dalam Al Qur’an, pengertian ini paling banyak dibahas, antara lain: pada Q.S. An Nisa (4): 3, 58, dan 129; Q.S. Asy Syura (42): 15; Al Maidah (5): 8, dan beberapa surat lain dalam Al Qur’an.

Dari berbagai makna adil dan keadilan di atas, maka dapat dipahami bahwa keadilan dalam distribusi merupakan suatu kondisi yang tidak memihak pada suatu golongan tertentu pada struktur ekonomi, sehingga kekayaan tidak menumpuk pada sebagian kecil masyarakat. Keadilan distribusi menjamin terciptanya pembagian yang adil, sehingga memberikan kontribusi pada kualitas hidup yang baik (Noor Ruslan Abdul Ghofur 2013).

B. Teori pertumbuhan ekonomi

Prasetyo (2012) mengungkapkan bahwa secara sederhana pertumbuhan ekonomi dapat dimaknai sebagai pertambahan pendapatan nasional keseluruhan dalam kurun waktu tertentu. Perekonomian suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan jika jumlah jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar dari tahun sebelumnya. Berikut rumus untuk mencari pertumbuhan ekonomi:

$$Gt = \frac{Y_{rt} - Y_{rt-1}}{Y_{rt-1}} \times 100$$

Keterangan:

Gt : Tingkat pertumbuhan ekonomi dinyatakan persen

Yrt : Pendapatan daerah tahun t

Yr.t-1 : Pendapatan daerah t -1

Teori pertumbuhan linier adalah evaluasi pembangunan yang dialami suatu Negara dimana tahapan tersebut mengalami tahapan tertentu. Dalam teori ini dapat dilihat teori pertumbuhan Adam Smith, dimana Adam Smith membagi teori

pertumbuhan menjadi lima tahap yang berurutan, yaitu: (1) masa perburuan; (2) masa beternak; (3) masa bercocok tanam; (4) perdagangan; (5) dan masa perindustrian. Masyarakat akan bergerak dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern yang kapitalis. Pertumbuhan ekonomi akan terpacu pada sistem pembagian kerja antar pelaku ekonomi. Spesialisasi merupakan hal penting untuk meningkatkan produktivitas kerja (Basuki Pujoalwanto, 2014).

Teori pertumbuhan ekonomi yang hampir sama dengan Adam Smith adalah teori pertumbuhan Frederich List. List menyebut tahapan pertumbuhan ekonomi terdiri atas: tahapan primitif, tahapan beternak, tahapan bertani, tahapan pengelolaan, tahapan pertanian, dan yang terakhir tahapan pengelolaan dan perdagangan. Perbedaan antara teori Adam Smith dengan List adalah pada tahapan ke-4, dimana List menyebut tahapan ke-4 dengan tahapan pengelolaan, sedangkan Adam Smith menyebut tahapan perdagangan. Selain itu, perbedaan juga terletak di tahap ke-5, yaitu pada teori Adam Smith adalah perdagangan, sedangkan List menyebutkan industri dan pengelolaan (Basuki Pujoalwanto, 2014).

Teori pertumbuhan semakin berkembang dengan munculnya Solow (1956). Solow berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah rangkaian kegiatan yang bersumber pada manusia, akumulasi modal, pemakaian teknologi modern, dan hasil. Pertumbuhan itu sendiri dapat berdampak positif ataupun negatif. Oleh karena itu, menurut Solow penambahan penduduk harus dimanfaatkan sebagai sumber daya yang positif.

Terdapat empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu: (1) sumber daya institusi; (2) kemajuan teknologi; (3) pertumbuhan penduduk; (4) dan yang terakhir adalah akumulasi modal (Arsyad 2010).

Harrod Dorman dalam analisisnya menyebutkan bahwa pertumbuhan jangka panjang yang mantap hanya bisa jika terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut (Tarigan, 2005):

$$g = k = n$$

Keterangan:

g = growth (tingkat pertumbuhan output)

k = capital (tingkat pertumbuhan modal)

n = tingkat pertumbuhan angkatan kerja

C. Teori ketenagakerjaan

Payaman (1985), mengungkapkan bahwa tenaga kerja didefinisikan sebagai penduduk yang berumur 10 tahun atau lebih yang bekerja, mencari pekerjaan, dan sedang melakukan kegiatan lain seperti sekolah dan kegiatan lain. Menurut BPS, penduduk yang berumur >10 tahun merupakan tenaga kerja. Dikatan tenaga kerja bilamana mereka melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh pendapatan atau keuntungan dengan rentan waktu minimal satu jam selama terus menerus minimal selama seminggu. Sedangkan menurut UU No. 13 tahun 2003 Bab I ayat 2

disebutkan bahwa tenaga kerja adalah orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Pujoalwanto (2014), berpendapat bahwa pekerja dapat diklasifikasikan berdasarkan: (1) penduduknya; (2) batas kerja; (3) kualitas. Lebih lanjut diterangkan bahwa berdasarkan penduduknya, tenaga kerja terbagi menjadi dua: (1) tenaga kerja, yaitu seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan kerja; (2) bukan tenaga kerja, yaitu mereka yang dianggap mampu dan tidak mau bekerja, meskipun ada permintaan bekerja.

Sumarsono (2009), berpendapat bahwa tenaga kerja atau penduduk usia 10 tahun ke atas mempunyai perilaku yang beraneka ragam. Dalam pasar kerja, perilaku mereka dibedakan menjadi dua (2) golongan, yaitu golongan yang aktif secara ekonomi dan bukan. Angkatan kerja termasuk aktif secara ekonomi. Golongan ini terdiri dari golongan masyarakat yang aktif menawarkan tenaga kerja dan berhadil memperolehnya dan penduduk yang menawarkan tenaga kerjanya di pasar tenaga kerja tetapi belum berhasil memperolehnya. Setidaknya ada empat (4) hal yang berkaitan dengan tenaga kerja, yaitu: bekerja, pencari kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan profil angkatan kerja.

Tenaga kerja dalam pembangunan merupakan faktor yang potensial secara keseluruhan. Tenaga kerja adalah daya manusia untuk melakukan pekerjaan. Pengertian umum tersebut sesuai dengan pengertian tenaga kerja yang dimuat dalam Undang-undang pokok ketenagakerjaan No. 14 tahun 1990, yaitu setiap orang yang

mampu melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan tenaga kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini yang dimaksud tenaga kerja adalah angkatan kerja (*labor force*) dan bukan angkatan kerja (*non labor force*).

Menurut Dumairy (1996) tenaga kerja dibedakan menjadi dua, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk dalam usia kerja yang bekerja, atau mempunyai pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan yang mencari pekerjaan. Sedangkan bukan angkatan kerja adalah penduduk dalam usia kerja yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan dan tidak sedang mencari pekerjaan (mahasiswa, pelajar), ibu rumah tangga, dan juga pensiunan.

Suryana & Kusnendi (2007) dalam kerangka analisis ketenagakerjaan, secara garis besar penduduk suatu Negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu: tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Secara praktis, pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga kerja hanya dibedakan oleh batas umur kerja. Di Indonesia digunakan batas umur kerja minimum 10 tahun tanpa batas maksimal. Pemilihan 10 tahun sebagai batas umur kerja minimum dilandasi oleh fakta bahwa pada umur tersebut sudah banyak penduduk terutama yang di desa sudah mencari pekerjaan. Tenaga kerja dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah tenaga kerja yang sedang bekerja, menganggur, dan sedang mencari pekerjaan .

$$\text{Tenaga Kerja} = \text{Angkatan Kerja} + \text{Bukan Angkatan Kerja}$$

$$\text{Angkatan kerja} = \text{Bekerja} + \text{Menganggur}$$

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) menunjukkan perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah tenaga kerja dalam kelompok umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan daerah yang sama. Jadi TPAK dapat dibedakan menurut kelompok umur tertentu, jenis kelamin, tingkat pendidikan, maupun daerah asal (Suryana & Kusnendi, 2007).

$$TPAK = \frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Tenaga Kerja}} \times 100\%$$

D. Teori Jumlah Penduduk

Menurut UU No. 24 tahun 2013 penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Penduduk dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Menurut BPS, penduduk usia kerja adalah mereka yang berusia lebih dari 15 tahun (15-64 tahun). Sedangkan penduduk bukan usia kerja adalah penduduk yang berusia 0-14 tahun dan penduduk 65 tahun keatas. Penduduk usia kerja dapat dibedakan menjadi dua, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja (Machmud, 2016).

Pentingnya faktor penduduk dalam kaitanya dengan pertumbuhan ekonomi perlu dipahami secara mendalam agar dinamika kependudukan dapat dipahami dengan mendalam. Mill (1956) berpandangan bahwa laju pertumbuhan penduduk melalui laju pertumbuhan bahan makanan sebagai suatu aksioma.

Malthus, dalam bukunya yang berjudul “*principles of population*” (1796) menyebutkan bahwa perkembangan manusia lebih cepat dibandingkan dengan produksi hasil-hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan manusia. Karena perkembangannya yang jauh lebih cepat dari pada pertumbuhan hasil produksi pertanian, maka Malthus memprediksi akan terjadi malapetaka terhadap kehidupan manusia. Malapetaka tersebut terjadi karena ada tekanan pertambahan jumlah penduduk yang cepat. Sementara keberadaan lahan semakin berkurang karena pembangunan berbagai infrastruktur. Akibatnya akan terjadi kelangkaan pangan bagi manusia.

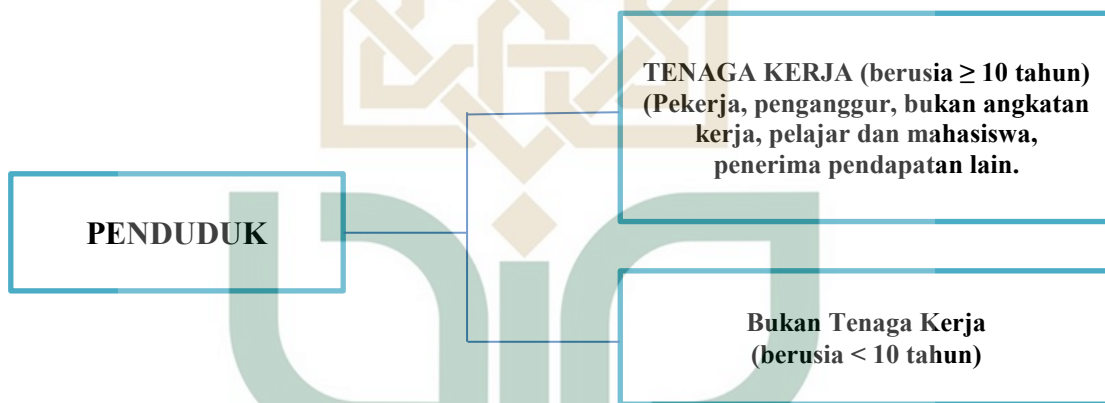
Kependudukan merupakan sebuah konsep yang berkaitan dengan dimensi sosial dan budaya. Akibatnya dinamika yang terjadi menjadi lebih kompleks. Beberapa literatur kependudukan menyebutkan, terdapat beberapa aspek kependudukan yang perlu mendapat perhatian khusus di Negara-negara berkembang, yaitu: (1) pertumbuhan yang tinggi; (2) struktur yang tidak *favorable*; (3) ketimpangan distribusi.

Dalam bukunya Abdul Manan (1997) menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk dalam Islam terbagi menjadi dua pandangan. Pandangan pertama

beranggapan bahwa perlunya keluarga berencana, sedangkan pendapat yang lainnya mengemukakan tidak sependapat dengan perlunya keluarga berencana.

Dalam konteks angkatan kerja, Dumairy (1996) mengklasifikasikan kependudukan dalam dua bagian besar, yaitu penduduk dalam kategori tenaga kerja, dan penduduk dalam kategori bukan tenaga kerja. Klasifikasi tersebut dapat dilihat dalam gambar berikut:

Gambar 2.1. Klasifikasi Penduduk



Sumber: Dumairy (1996)

Menurut Dumairy (1996), penduduk berfungsi ganda dalam perekonomian. Dalam konteks pasar, penduduk berada di posisi penawaran dan juga permintaan. Di sisi permintaan, penduduk adalah konsumen, sumber permintaan akan barang dan jasa. Di sisi penawaran penduduk adalah produsen, pekerja, atau penghasil barang. Dalam konteks pemnbangunan, terdapat beberapa pendapat peran variabel penduduk dalam proses pembangunan itu sendiri. Ada pandangan yang menganggap penduduk

sebagai variabel penghambat pembangunan dan juga yang bertanggung jawab variabel penduduk sebagai pemicu adanya pembangunan. Dalam literasi kuno, variabel penduduk dianggap sebagai faktor penghambat pembangunan, apalagi dalam jumlah besar dan pertumbuhan yang tinggi. Penduduk yang besar akan menurunkan pendapatan per kapita dan menimbulkan masalah ketenagakerjaan. Berbeda dengan itu, pada literatur modern, variabel penduduk merupakan faktor pemicu pertumbuhan. Kegiatan produksi merupakan efek dari adanya permintaan barang dari konsumen. Konsumsi inilah yang mengakibatkan permintaan agregat, kemudian akan berdampak pada meningkatnya usaha produksi.

E. Telaah Pustaka

Penelitian tentang ketimpangan pendapatan telah banyak dilakukan, dimana penelitian yang serupa dengan tema penelitian ini berupa jurnal ataupun skripsi. Penelitian yang sudah ada tersebut yang kemudian mendasari penyusunan skripsi ini. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Diah Pradnyadewi T. dan Ida Bagus (2017) penelitiannya yang berjudul “Pengaruh IPM, Biaya Infrastruktur, Investasi, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Distribusi Pendapatan di Provinsi Bali”. Dalam penelitian tersebut, peneliti menggunakan SPSS sebagai alat analisis. Penelitian tersebut menyatakan bahwa IPM dan investasi tidak berpengaruh langsung terhadap ketimpangan distribusi. Biaya infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh langsung dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

Ani Nurlaili (2016) dalam sebuah penelitian yang berjudul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Pulau Jawa Tahun

2007-2013”. Hasil dari penelitian tersebut adalah PDRB per kapita, populasi penduduk, dan TPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi di Pulau Jawa.

Benedictus Riandoko, Adi Kurniawan dan FX. Sugianto (2012) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Share Sektor Industri dan Pertanian dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Ketimpangan Wilayah Antar Kabupaten/Kota di Jawa Tengah”. Regresi data panel digunakan dalam menganalisis penelitian ini. Dalam penelitian ini menyatakan bahwa sektor industri dan pertanian berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan. Variabel ekonomi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap ketimpangan. Sedangkan variabel jumlah partisipasi angkatan kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan.

Ma’imun Musfidar (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Sulawesi Selatan Tahun 2001-2010”. Penelitian tersebut menyatakan bahwa sektor industri terhadap PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. UMR berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Sedangkan populasi penduduk di Sulawesi Selatan yang berumur 15-55 tahun berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

Yosi Eka Putri, Syamsul Amar dan Hasdi Aimon (2015) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan di Indonesia”. Penelitian ini menyatakan bahwa derajat

otonomi fiskal daerah, rasio pajak, dan investasi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penelitian ini menggunakan teknik replikasi dengan menggabungkan beberapa variabel penelitian dari variabel penelitian terdahulu. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu terletak pada lingkup penelitian dan variabel yang digunakan. Lingkup penelitian yang dimaksud adalah tahun penelitian yang berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya. Sedangkan variabel yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari gabungan beberapa variabel dalam penelitian yang sudah ada kemudian dikombinasikan atau dipilih variabel yang sekiranya tepat untuk penelitian ini.

Perbedaan lain antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu juga terletak pada cara menganalisa, dimana dalam penelitian ini peneliti membandingkan faktor penentu antara daerah yang memiliki ketimpangan tinggi dan rendah. Karena pada beberapa penelitian sebelumnya belum di klasifikasikan antara ketimpangan tinggi dan rendah secara relatif.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis & Tahun	Judul	Variabel & Alat Analisis	Ringkasan Hasil
1	Ani Nurlaili (2016)	Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Pulau Jawa	Variabel: Dependen: Ketimpangan pendapatan Independen: PDRB per kapita, populasi penduduk, tingkat pengangguran, desentralisasi fiskal Alat analisis: Regresi data panel	Hasil analisis menunjukkan bahwa ketimpangan distribusi di Pulau Jawa tahun 2007-2013 dipengaruhi oleh PDRB per kapita, populasi penduduk, dan TPT. Ketiaga faktor tersebut berpengaruh positif terhadap distribusi pendapatan di Pulau Jawa
2	Diah Pradnyadewi T. dan Ida Bagus (2017)	Pengaruh IPM, Biaya Infastruktur, Investasi, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Pulau Bali.	Variabel: Dependen: Ketimpangan pendapatan Independen: IPM, biaya Infastruktur, investasi, pertumbuhan ekonomi	Biaya infastruktur dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Sedangkan IPM dan Investasi tidak berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.
3	Benedictus Riandoko Adi Kurniawan dan FX. Sugianto (2012)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Share Sektor Industri dan Pertanian, dan Tingkat Partisipasi Kerja Terhadap	Variabel: Dependen: Ketimpangan pembangunan Independen: Pertumbuhan ekonomi, nilai share sektor pertanian & industry, tingkat partisipasi	Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan, sektor pertanian & industry berpengaruh positif terhadap ketimpangan, jumlah pekerja berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan.

		Ketimpangan wilayah antar kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2002-2010.	angkatan kerja Alat analisis Analisis statistik deskriptif & regresi data panel	
4	Ma'imun Musfidar (2012)	Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Sulawesi Selatan Tahun 2001-2010	Variabel: Dependen: Ketimpangan Independen: Populasi penduduk, UMR, Kontribusi sektor industri Alat analisis: Regresi	Populasi penduduk dan kontribusi sektor industri berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan, UMR berpengaruh negatif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.
5	Yosi Eka Putri, Syamsul Amar dan Hasdi Aimon (2015)	Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan di Indonesia	Variabel: Dependen: Ketimpangan pendapatan & pertumbuhan ekonomi Independen: Derajat otonomi fiskal daerah, rasio pajak, investasi, pertumbuhan ekonomi, produktifitas tenaga kerja, IPM Alat analisis <i>Simultaneous equation model analysis & indirect least squared method (ILS) common effect</i>	Variabel derajat otonomi fiskal, rasio pajak, dan investasi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Pertumbuhan ekonomi, produktifitas tenaga kerja, investasi, dan IPM berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan

F. Pengembangan Hipotesis

Uraian teoritik diharapkan dapat membantu penelitian ini yang selanjutnya akan memberikan pemikiran yang bersifat konseptual. Salah satu diantaranya adalah memberikan gambaran kesimpulan sementara pada penelitian ini yang disebut dengan hipotesis. Penelitian ini terdapat beberapa hipotesis, sebagaimana dipaparkan di bawah ini:

1. Hubungan jumlah penduduk dengan ketimpangan distribusi pendapatan

Masalah utama kependudukan adalah pada tingkat produktivitas dan tingkat pengangguran pada sebuah wilayah. Pertambahan penduduk tidak menjadi masalah saat tingkat pengangguran rendah. Pertumbuhan penduduk yang semakin bertambah dua kali lipatnya akan menyebabkan penurunan tingkat pembangunan menuju taraf yang rendah, para pekerja akan menerima upah untuk hidup. Sesuai dengan hukum hasil lebih yang makin berkurang (*the law of deminishing returns*), yang artinya penambahan jumlah tenaga kerja akan berakibat yaitu tambahan hasil yang diperoleh setelah pada titik tertentu (Arsyad, 2010).

Penduduk dengan jumlah yang besar bisa menjadi beban bagi pembangunan dan dapat menimbulkan masalah dalam segala aspeknya. Dengan demikian, keberadaan suatu penduduk dapat menjadi beban sebuah pembangunan tergantung pada kualitas yang di miliki oleh penduduk itu sendiri, bukan didasarkan pada kuantitas penduduk. Pada negara berkembang, jumlah penduduk menjadi suatu masalah. Dengan kemampuan individu yang kurang memadahi, jumlah penduduk

akan memicu timbulnya semakin kecilnya kesempatan kerja dan selanjutnya akan berdampak pada kesenjangan sosial dan ketimpangan (Suryana & Kusnendi, 2007).

Nurlaili (2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa populasi jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap ketimpangan di Pulau Jawa. Senada dengan penelitian Ani Nurlaili, Musfidar (2012) dalam penelitiannya menyatakan bahwa variabel jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan. Dari teori dan hasil penelitian sebelumnya diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha1: Jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Jawa Tengah periode tahun 2010-2015.

Ha1.2: Jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan tinggi relatif distribusi pendapatan di Jawa Tengah periode tahun 2010-2015.

Ha1.3: Jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan rendah relatif distribusi pendapatan di Jawa Tengah periode tahun 2010-2015.

2. Hubungan partisipasi angkatan kerja dengan ketimpangan distribusi pendapatan

Kemampuan suatu daerah dengan daerah lain dalam hal penyerapan tenaga kerja jelas berbeda. Perbedaan kemampuan penyerapan tenaga kerja antar daerah inilah yang akan menimbulkan kemungkinan ketimpangan pendapatan antar wilayah. Kesempatan kerja dan kemampuan individu setiap wilayah akan berdampak pada

tingkat partisipasi angkatan kerja dan selanjutnya akan berdampak pada ketimpangan antar daerah (Suryana & Kusnendi, 2007).

Riandoko (2012) dalam penelitiannya menyatakan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Senada dengan itu, Putri, Amar, dan Aimon (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Dari teori dan hasil penelitian sebelumnya tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha2: Partisipasi angkatan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Jawa Tengah periode 2010-2015.

Ha2.1: Partisipasi angkatan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan tinggi relatif distribusi pendapatan di Jawa Tengah periode 2010-2015.

Ha2.2: Partisipasi angkatan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Jawa Tengah periode 2010-2015.

3. Hubungan pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan distribusi pendapatan

Hubungan antara tingkat pendapatan dan distribusi pendapatan berbentuk U terbalik. Pada awal pembangunan, ketimpangan distribusi pendapatan meningkat karena proses urbanisasi dan desentralisasi, namun kemudian pada akhir pembangunan tingkat ketimpangan pendapatan mengalami penurunan, khususnya

pada kawasan perkotaan mampu menyerap tenaga kerja yang berasal dari pedesaan (Arsyad, 2010).

Ketimpangan pendapatan dapat diukur dengan rasio gini dan beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu pertumbuhan ekonomi, produktivitas tenaga kerja, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan beberapa variabel lainnya. Pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan atau sebaliknya (Todaro, 2003).

Pertumbuhan ekonomi yang meningkat di suatu daerah akan tetapi tidak diikuti oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah lain maka akan menyebabkan ketimpangan pembangunan menjadi semakin tinggi, hal ini terjadi karena pada awal-awal pembangunan pelaku ekonomi suka berinvestasi pada daerah– daerah yang relatif maju sebab infrastruktur lengkap, banyak tenaga kerja yang terlatih, peluang bisnis tersedia sehingga daerah yang tadinya juga sudah maju akan semakin maju dan keadaan ini akan mendorong naiknya pertumbuhan ekonomi daerah maju. Daerah-daerah yang relatif tertinggal akan semakin ketinggalan sebab daerah tersebut memiliki banyak keterbatasan seperti tenaga kerja terdidik dan terlatih tidak tersedia, infrastruktur biasanya tidak memadai sehingga daerah ini akan semakin tertinggal. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pradnyadewi T dan Idabagus (2017) menyimpulkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan. Senada dengan itu, penelitian yang dilakukan oleh Riandoko (2012) menyatakan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan

terhadap ketimpangan. Dari penelitian sebelumnya tersebut, hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

Ha3: Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi di Jawa Tengah periode tahun 2010-2015.

Ha3.1: Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan tinggi relatif distribusi di Jawa Tengah periode tahun 2010-2015.

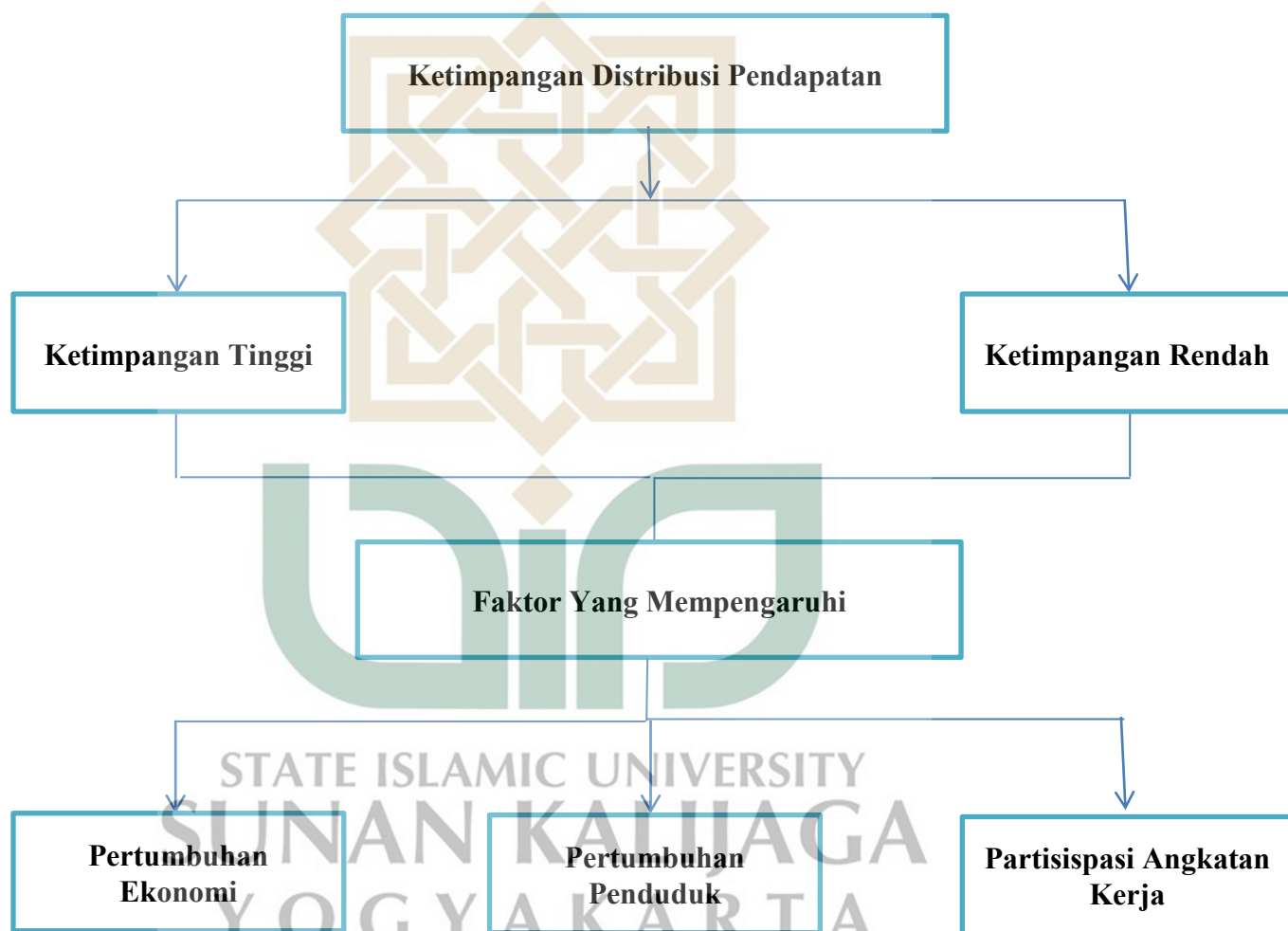
Ha3.2: Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan rendah relatif distribusi di Jawa Tengah periode tahun 2010-2015.



G. Kerangka Pemikiran

Dalam tahapan penulisan ini secara garis besar digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Tujuan penelitian kuantitatif adalah menguji teori-teori tertentu dengan cara analisis data yang ada dan penjelasan pengaruh dari variabel yang diteliti. Variabel ini biasanya diukur dengan instrumen penelitian sehingga data yang terdiri dari angka-angka dapat dianalisis berdasarkan prosedur statistik.

B. Jenis dan Teknik Pengumpulan data

Data yang digunakan adalah data panel sedangkan teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Jawa Tengah maupun nasional. Selain dari BPS, data juga didapatkan dari internet, buku, serta literatur yang mendukung teori yang dibuat.

C. Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Adapun untuk pengambilan sampel menggunakan teknik sampel jenuh. Sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel dimana semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan apabila jumlah populasinya relative kecil (Sugiyono, 2012).

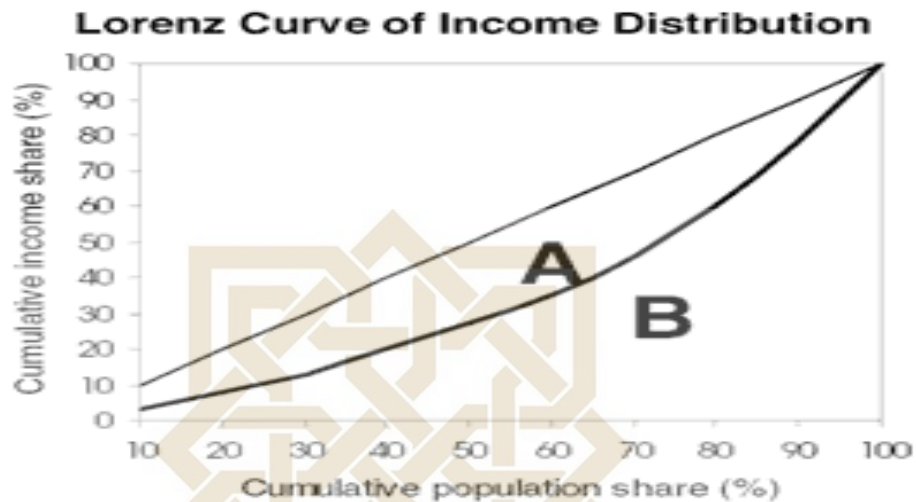
D. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Robbins (2009: 23-24 dalam Noor, 2011: 48 -49) menyatakan bahwa variabel dependen adalah variabel yang akan diteliti dan dipengaruhi variabel lain sedangkan variabel independen adalah variabel sebab yang diperkirakan dari beberapa perubahan dalam variabel dependen. Variabel independen dalam analisis ini adalah jumlah penduduk (X1), jumlah partisipasi angkatan kerja (X2), pertumbuhan ekonomi (X3). Sedangkan variabel dependen dalam analisis ini adalah variabel ketimpangan pendapatan (Y).

1. Ketimpangan Pendapatan

Amir Machmud (2016) menyatakan bahwa koefisien gini adalah ukuran ketimpangan distribusi. Koefisien gini pertama kali dikembangkan oleh ahli statistik dan ahli sosiologi Italia bernama Corrado Gini dan dipublikasikan pada tahun 1912 dalam makalahnya yang berjudul "*variability and mutability*". Koefisien gini dinyatakan dalam bentuk rasio yang nilainya 0-1. Nilai 0 menunjukkan bahwa pemerataan yang sempurna dimana semua nilai adalah sama, sedangkan nilai 1 menunjukkan nilai yang paling tinggi yaitu satu orang menguasai semuanya. Menurut definisinya, koefisien adalah perbandingan luas daerah antara kura Lorenz dan garis lurus 45 derajat.

Gambar 3.1 Kurva Lorenz



Sumber: Dumairy (1996)

Pada gambar, Kurva Lorenz memetakan kumulatif pendapatan pada sumbu vertikal dengan kumulatif penduduk pada sumbu horisontal. Pada contoh, 40 persen penduduk menguasai sekitar 20 persen total pendapatan. Koefisien gini diperoleh dengan membagi luas daerah A dengan (A+B).

Jika setiap individu memiliki pendapatan yang sama, maka kurva distribusi pendapatan akan tepat jatuh pada garis lurus 45 derajat pada gambar, dan koefisien gini bernilai 0. Sebaliknya jika seorang individu menguasai seluruh pendapatan, dikatakan terjadi ketimpangan sempurna (maksimum) sehingga kurva distribusi pendapatan akan jatuh pada titik (0,0), (0,100) dan (100,100), dan angka koefisien gini bernilai 1.

Dalam penelitian ini, peneliti mengklasifikasi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah menjadi ketimpangan tinggi dan ketimpangan rendah secara relatif.

Berikut cara untuk menentukan kabupaten atau kota dengan ketimpangan tinggi dan rendah secara relatif:

- **Rumus 1: Jika rata-rata ketimpangan seluruh Kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2015 > (lebih besar) dari rata-rata ketimpangan satu Kabupaten/kota Jawa Tengah 2010-2015 maka ketimpangan rendah**
- **Rumus 2: Jika rata-rata ketimpangan seluruh Kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2015 < (kurang dari) atau = (sama dengan) rata-rata ketimpangan satu Kabupaten/kota Jawa Tengah**

Setelah dilakukan rata-rata setiap Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dan kemudian dilakukan pemilahan antara kabupaten atau kota yang memiliki tingkat ketimpangan tinggi dan rendah relatif, maka didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1 Klasifikasi Ketimpangan Relatif Daerah di Jawa Tengah
Tahun 2010-2015

Pengklasifikasian Ketimpangan Tinggi & Rendah Relatif Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah			
Ketimpangan Tinggi		Ketimpangan Rendah	
1	Cilacap	1	Purbalingga
2	Banyumas	2	Kebumen
3	Barjarnegara	3	Rembang
4	Purworejo	4	Pati

5	Wonosobo	5	Jepara
6	Kabupaten Magelang	6	Demak
7	Boyolali	7	Semarang
8	Sukoharjo	8	Batang
9	Klaten	9	Pekalongan
10	Wonogiri	10	Pemalang
11	Karanganyar	11	Tegal
12	Sragen	12	Brebes
13	Grobogan		
14	Kudus		
15	Temanggung		
16	Kendal		
17	Kota Magelang		
18	Kota Surakarta		
19	Kota Salatiga		
20	Kota Semarang		
21	Kota Pekalongan		
22	Kota Tegal		
23	Kudus		

Sumber: BPS (data diolah)

2. Pertumbuhan Ekonomi

Prasetyo (2012) menyatakan bahwa secara sederhana pertumbuhan ekonomi dapat dimaknai sebagai pertambahan pendapatan nasional keseluruhan dalam kurun waktu tertentu. Perekonomian suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan jika jumlah jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar dari tahun sebelumnya. Berikut rumus untuk mencari pertumbuhan ekonomi:

$$Gt = \frac{Y_{rt} - Y_{rt-1}}{Y_{rt-1}} \times 100$$

Keterangan:

Gt : Tingkat pertumbuhan ekonomi dinyatakan persen

Yrt : Pendapatan daerah tahun t

Yr.t-1 : Pendapatan daerah t -1

3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) menunjukkan perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah tenaga kerja dalam kelompok umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan daerah yang sama. Jadi TPAK dapat dibedakan menurut kelompok umur tertentu, jenis kelamin, tingkat pendidikan, maupun daerah asal (Suryana & Kusnendi, 2007).

$$TPAK = \frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Tenaga Kerja}} \times 100\%$$

4. Jumlah Penduduk

Menurut UU No. 24 tahun 2013 penduduk adalah warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Penduduk dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Menurut BPS, penduduk usia kerja adalah mereka yang berusia lebih dari 15 tahun (15-64 tahun). Sedangkan penduduk bukan usia kerja adalah penduduk yang berusia 0-14 tahun dan penduduk 65 tahun keatas. Penduduk usia kerja

dapat dibedakan menjadi dua, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja (Amir Machmud, 2016).

E. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, dan tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel. Analisis data panel adalah regresi panel data gabungan dari data *time series* dan data *cross section*. Alat analisis yang digunakan peneliti adalah dengan menggunakan *software* ekonometrika Eviews 8. Model persamaan analisis data panel dapat ditulis sebagai berikut:

$$GR = \beta_0 + \beta_1 \ln PE_{it} + \beta_2 \ln TPAK_{it} + \beta_3 \ln JP_{it} + e_{it}$$

Keterangan:

GR = Ketimpangan pendapatan

i = Kabupaten/kota

t = Waktu (tahun 2010.....2015)

β_0 = Konstanta

PE = Pertumbuhan ekonomi

TPAK = Tingkat partisipasi angkatan kerja

JP = Jumlah penduduk

e = variabel pengganggu

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = koefisien regresi dari masing-masing variabel yang mempengaruhi

Untuk menentukan model yang paling cocok digunakan, maka terlebih dahulu melakukan uji spesifikasi model. Berikut adalah uji spesifikasi model untuk menentukan data panel:

a. Uji Spesifikasi Model

a) Uji Spesifikasi Model dengan Uji Hausman

Uji ini bertujuan untuk mengetahui model yang sebaiknya dipakai, yaitu *fixed effect model* (FEM) atau *random effect model* (REM). Adapun hipotesis yang digunakan dalam uji Hausman adalah sebagai berikut:

H0 : Random Effect

H1 : Fixed Effect

Uji Hausman ini didasarkan pada distribusi *chi-squares* dengan *degree of freedom* sebesar jumlah variabel independen. Jika nilai statistik Hausman lebih besar dari *Chi-Square* tabel atau probabilitasnya lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05, maka H0 ditolak dan *Fixed Effect Model* yang dipilih. Sedangkan, jika nilai statistik Hausman lebih kecil dari *Chi-Square* tabel dan probabilitasnya lebih besar dari taraf signifikansi 0,05, maka H0 diterima dan *Random Effect Model* yang dipilih. Untuk mendapatkan nilai statistik Hausman dapat menggunakan rumus sebagai berikut (Greene, 2000):

Keterangan:

b = koefisien *random effect*

β = koefisien *fixed effect*

K = jumlah variabel bebas

Ketika model yang terpilih adalah *fixed effect* maka tidak perlu dilakukan uji lagi. Namun jika yang terpilih adalah *random effect* maka perlu dilakukan uji lagi, yaitu uji *Lagrange Multiplier* (LM). Uji LM digunakan untuk mengetahui apakah sebaiknya memakai *random effect model* (REM) atau *common effect model* (CEM).

b) Uji *Likelihood Ratio*

Uji *likelihood ratio* digunakan untuk memilih model yang terbaik, apakah *Pooled Least Square* (PLS) atau *Fixed Effect Model* (FEM). Hipotesis dalam uji ini adalah:

H₀: Pooled Least Square

H_a: Fixed Effect Model

Apabila nilai probabilitas *likelihood ratio* lebih kecil dari taraf signifikan 0,05, maka hipotesis 0 ditolak yang artinya model yang baik digunakan adalah *model Fixed Effect Model*, juga sebaliknya.

b. Uji Statistika

a) Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebasnya secara simultan terhadap variabel terikat. Uji F dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas F. Apabila nilai probabilitas $F <$ taraf signifikansi artinya variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Apabila nilai probabilitas $F >$ taraf signifikansi artinya variabel bebas secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

b) Koefisien determinasi (R^2)

Koefisien determinan digunakan untuk mengukur seberapa besar variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen, karena nilai yang diperoleh merupakan nilai R^2 yang telah dikoreksi sehingga hasilnya tidak bias. Semakin besar nilai R^2 maka semakin tepat atau cocok suatu garis regresi, sebaliknya semakin kecil R^2 maka semakin tidak tepat garis regresi tersebut untuk mewakili data hasil observasi

c) Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara parsial terhadap variabel terikatnya. Uji t dapat dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas t. Apabila nilai probabilitas $t <$ taraf signifikansi artinya variabel bebas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Apabila nilai probabilitas $t >$ taraf signifikansi artinya variabel bebas secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB IV

ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Keadaan Geografis

Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi di Jawa, letaknya diapit oleh dua provinsi besar, yaitu Jawa Barat dan Jawa Timur. Letaknya antara $5^{\circ}40'$ dan $8^{\circ}30'$ Lintang Selatan dan antara $108^{\circ}30'$ dan $111^{\circ}30'$ Bujur Timur (termasuk Pulau Karimunjawa). Jarak terjauh dari Barat ke Timur adalah 263 km dan dari Utara ke Selatan 226 km (tidak termasuk Pulau Karimunjawa).

Berdasarkan posisi geografisnya, Jawa Tengah memiliki batas-batas sebagai berikut:

Utara : Laut Jawa;

Selatan : Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Samudra Hindia;

Barat : Provinsi Jawa Barat;

Timur : Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (2017), luas wilayah Provinsi Jawa Tengah adalah 3.254.412 Ha atau 25,04% dari luas pulau Jawa. Luas yang ada, terdiri dari 992 ribu hektar (30,47 persen) lahan sawah dan 2,26 juta hektar (69,53 persen) bukan lahan sawah. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, luas lahan sawah turun sebesar 0,013 persen, sebaliknya luas bukan lahan sawah naik sebesar 0,006%.

2. Gambaran Perekonomian

Situasi perekonomian yang semakin membaik menyebabkan berkurangnya penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan. Hal ini ditunjukkan dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin dari tahun ke tahun.

Berdasarkan data yang diperoleh dari website resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, pada tahun 2011 jumlah penduduk miskin sebesar 5,26 juta atau sekitar 16,21 persen dari total penduduk Jawa Tengah. Kemudian jumlah penduduk miskin tahun 2012 menurun menjadi 4,95 juta atau sekitar 14,98 persen dari total penduduk Jawa Tengah. Kemudian jumlah penduduk miskin tahun 2014 menurun lagi menjadi 4,81 juta atau sekitar 14,44 persen dari total penduduk Jawa Tengah.

Pada tahun 2014, jumlah keluarga pra sejahtera di Jawa Tengah mencapai 2,66 juta atau 26,11 persen dari total keluarga. Sementara itu, untuk jumlah keluarga sejahtera I, II, III serta III plus masing – masing tercatat 2,11 juta, 2,38 juta, 2,58 juta serta 449 ribu keluarga, atau dalam presentase berturut – turut sebesar 20,70 persen, 23,40 persen, 25,38 persen dan 4,42 persen.

Kondisi perekonomian di suatu daerah dapat dilihat dari berbagai aspek, baik dalam pertumbuhan ekonomi maupun dalam keadaan sebenarnya di lapangan lewat aspek ketimpangan sosial.

3. Jumlah Penduduk

Berdasarkan Angka Sementara Proyeksi Sensus Penduduk (SP) 2010, jumlah penduduk Jawa Tengah pada tahun 2014 tercatat sebesar 33,52 juta jiwa sekitar 13,29

persen dari jumlah penduduk Indonesia. Ini menempatkan Jawa Tengah sebagai provinsi ketiga di Indonesia dengan jumlah penduduk terbanyak setelah Jawa Barat dan Jawa Timur. Jumlah penduduk perempuan lebih besar dibandingkan jumlah penduduk laki-laki. Ini ditunjukkan oleh rasio jenis kelamin (rasio jumlah penduduk laki-laki terhadap jumlah penduduk perempuan) sebesar 98,41 persen.

Penduduk Jawa Tengah belum menyebar secara merata di seluruh wilayah Jawa Tengah. Umumnya penduduk banyak menumpuk di daerah kota dibandingkan kabupaten. Secara rata-rata kepadatan penduduk Jawa Tengah tahun 2014 tercatat sebesar 1.030 jiwa setiap kilometer persegi, dan wilayah terpadat adalah Kota Surakarta dengan tingkat kepadatan lebih dari 11 ribu orang setiap kilometer persegi.

4. Partisipasi Angkatan Kerja

Tenaga kerja yang terampil merupakan potensi sumberdaya manusia yang sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan menyongsong era globalisasi. BPS merujuk pada konsep/definisi ketenagakerjaan yang direkomendasikan oleh International Labour Organization (ILO). Penduduk usia kerja didefinisikan sebagai penduduk yang berumur 15 tahun ke atas, dan dibedakan sebagai Angkatan Kerja dan bukan Angkatan Kerja. Pertumbuhan penduduk tiap tahun akan berpengaruh terhadap pertumbuhan angkatan kerja.

Berdasarkan hasil Sakernas, angkatan kerja di Jawa Tengah tahun 2014 mencapai 17,55 juta orang atau naik sebesar 3,30 persen dibanding tahun sebelumnya. Tingkat partisipasi angkatan kerja penduduk Jawa Tengah tercatat

sebesar 70,72 persen. Sedangkan angka pengangguran terbuka di Jawa Tengah sebesar 6,02 persen.

B. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif dalam penelitian ini menguji empat variabel yang terdiri dari satu variabel dependen yaitu ketimpangan pendapatan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu 2010-2015. Ketimpangan pendapatan dalam penelitian ini diukur menggunakan rasio gini. Kemudian tiga variabel independen yaitu pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, dan tingkat partisipasi angkatan kerja dari 35 Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Berikut adalah deskripsi data dari setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini:

**Tabel 4.5 Statistik Deskriptif Data Penelitian
(Ketimpangan Menyeluruh)**

	RG	JP	LPDRB	TPAK
Mean	0.322105	946879.8	5.162632	70.25627
Median	0.330000	896038.0	5.250000	70.43000
Maximum	0.410000	1781379.	6.710000	79.35000
Minimum	0.190000	118424.0	1.660000	60.17000
Std. Dev.	0.039872	402906.0	0.809270	3.814715
Observations	210	210	210	210

Sumber: Lampiran: 3

Dalam perhitungan statistik tersebut dapat dilihat bahwa terdapat jumlah sampel (N) sebesar dua ratus sembilan. Indeks gini sebagai variabel dependen dalam penelitian ini menggambarkan kondisi ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Jawa Tengah. Pada periode 2010-2015 menunjukkan rata-rata ketimpangan dsitribusi pendapatan sebesar 0,32. Nilai indeks gini sebesar 0,32 tersebut termasuk dalam

kategori ketimpangan rendah. Indeks gini terendah yaitu 0,19 yaitu Kabupaten Rembang pada tahun 2010. Sedangkan Indeks gini tertinggi sebesar 0,41 yaitu Kabupaten Blora pada tahun 2013.

Jumlah penduduk di Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu 2010-2015 memiliki rata-rata sebesar 946.879 jiwa, dimana jumlah penduduk terbesar dengan jumlah 1.781.379 yaitu Kabupaten Brebes pada tahun 2014. Sedangkan jumlah penduduk terkecil dengan angka 118.424 jiwa yaitu di Magelang pada tahun 2010.

Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah yang dinyatakan dalam nilai laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga konstan selama kurun waktu 2010-2015 memiliki rata-rata sebesar 5.16% . Jumlah pertumbuhan terendah sebesar 1.66% yaitu Kabupaten Cilacap pada tahun 2013. Sedangkan nilai pertumbuhan tertinggi sebesar 6.71% yaitu Kabupaten Banyumas pada tahun 2013.

Tingkat partisipasi angkatan kerja di Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu 2010-2015 memiliki rata-rata sebesar 70.2%. Dengan nilai partisipasi angkatan kerja terendah sebesar 60.17% yaitu di Banyumas tahun 2015. Sedangkan nilai tingkat partisipasi angkatan kerja tertinggi sebesar 79.35% yaitu di Banjarnegara tahun 2013.

Tabel 4.6 Statistik Deskriptif Data Penelitian
(Katimpangan Rendah)

	RG	JP	LPDRB	TPAK
Mean	0.295278	109161	5.162639	69.78014
Median	0.305000	1111997	5.225000	70.18000
Maximum	0.360000	1781379	6.280000	76.59000
Minimum	0.190000	592481.0	4.050000	60.91000
Std. Dev.	0.036847	304558.3	0.560548	3.843959
Observations	72	72	72	72

Sumber: Lampiran: 3

Dalam perhitungan statistik tersebut dapat dilihat bahwa terdapat jumlah sampel (N) tujuh puluh dua. Indeks gini sebagai variabel dependen dalam penelitian ini menggambarkan kondisi ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Jawa Tengah. Pada periode 2010-2015, rasio gini pada ketimpangan dengan kategori rendah menunjukkan rata-rata ketimpangan dsitribusi pendapatan sebesar 0,29. Nilai indeks gini sebesar 0,29 tersebut termasuk dalam kategori ketimpangan rendah. Indeks gini terendah yaitu 0,19 yaitu Kabupaten Rembang pada tahun 2010. Sedangkan Indeks gini tertinggi sebesar 0,36 yaitu Kabupaten Semarang tahun 2012.

Jumlah penduduk di Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu 2010-2015 memiliki rata-rata sebesar 109161 jiwa, dimana jumlah penduduk terbesar dengan jumlah 1.781.379 yaitu Kabupaten Brebes pada tahun 2014. Sedangkan jumlah penduduk terkecil dengan angka 592481 jiwa yaitu di Rembang pada tahun 2010.

Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah yang dinyatakan dalam nilai laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga konstan selama kurun waktu 2010-2015 memiliki rata-rata sebesar 51%. Jumlah pertumbuhan

terendah sebesar 4.05% yaitu Kabupaten Kebumen pada tahun 2014. Sedangkan nilai pertumbuhan tertinggi sebesar 6,28% yaitu Kabupaten Kebumen pada tahun 2015.

Tingkat partisipasi angkatan kerja di Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu 2010-2015 memiliki rata-rata sebesar 69.7%. Dengan nilai partisipasi angkatan kerja terendah sebesar 60.91% yaitu di Tegal tahun 2015. Sedangkan nilai tingkat partisipasi angkatan kerja tertinggi sebesar 76.59% yaitu Semarang pada tahun 2012.

**Tabel 4.7 Statistik Deskriptif Data Penelitian
(Ketimpangan Tinggi)**

	RG	JP	LPDRB	TPAK
Mean	0.333929	874243.8	5.149929	70.53093
Median	0.340000	856529.5	5.245000	70.82000
Maximum	0.410000	1701114	6.710000	79.35000
Minimum	0.020000	118424.0	1.660000	60.17000
Std. Dev.	0.036985	424227.1	0.910943	3.764064
Observations	138	138	138	138

Sumber: Lampiran: 3

Dalam perhitungan statistik tersebut dapat dilihat bahwa terdapat jumlah sampel (N) seratus empat puluh. Indeks gini sebagai variabel dependen dalam penelitian ini menggambarkan kondisi ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Jawa Tengah. Pada periode 2010-2015, rasio gini pada ketimpangan dengan kategori rendah menunjukkan rata-rata ketimpangan dsitribusi pendapatan sebesar 0,33. Nilai indeks gini sebesar 0,33 tersebut termasuk dalam kategori ketimpangan rendah. Indeks gini terendah yaitu 0,20 yaitu Kabupaten Jepara pada tahun 2010. Sedangkan Indeks gini tertinggi sebesar 0,41 yaitu Kabupaten Blora pada tahun 2013.

Jumlah penduduk di Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu 2010-2015 memiliki rata-rata sebesar 874243 jiwa, dimana jumlah penduduk terbesar dengan jumlah 1.701.114 jiwa yaitu Kabupaten Semarang pada tahun 2015. Sedangkan jumlah penduduk terkecil dengan angka 118.424 jiwa yaitu di Magelang pada tahun 2010.

Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah yang dinyatakan dalam nilai laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga konstan selama kurun waktu 2010-2015 memiliki rata-rata sebesar 51%. Jumlah pertumbuhan terendah sebesar 1.66% yaitu Kabupaten Cilacap pada tahun 2013. Sedangkan nilai pertumbuhan tertinggi sebesar 6.71% yaitu Kabupaten Banyumas pada tahun 2013.

Tingkat partisipasi angkatan kerja di Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu 2010-2015 memiliki rata-rata sebesar 70.5%. Dengan nilai partisipasi angkatan kerja terendah sebesar 60.17% yaitu di Banyumas tahun 2015. Sedangkan nilai tingkat partisipasi angkatan kerja tertinggi sebesar 79.35% yaitu di Banjarnegara tahun 2012.

C. Analisis Regresi Data Model

C.1. Uji Spesifikasi Model (Ketimpangan Menyeluruh)

a. Uji *Chow Test*

Metode ini untuk memilih antara *common effect model* atau *fixed effect model*.

Dengan hipotesis sebagai berikut:

H0: *common effect mode*

H1: *fixed effect model*

Berdasarkan hasil estimasi *common effect mode* dan *fixed effect model* didapatkan F statistik sebagai berikut:

Tabel 4.8 Uji Chow Test
(Ketimpangan Menyeluruh)

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	4.465907	(34,171)	0.0000
Cross-section Chi-square	132.818638	34	0.0000

Sumber: Lampiran: 4

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai probabilitas sebesar 0,0000 < taraf signifikan 5% artinya H0 ditolak, sehingga model yang dipilih adalah *Fixed Effect Model*.

b. Uji Hausman Test

Uji Hausman Test digunakan untuk memilih antara *random effect* atau *fixed effect*. Hipotesis dalam uji ini adalah:

H0: *random effect* model

H1: *Fixed effect* model

Berdasarkan hasil estimasi *random effect* model dan *random effect* model, diperoleh Fstatistik sebagai berikut:

Tabel 4.9 Uji Hausman Test

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	26.445477	3	0.0000

Sumber: Lampiran: 4

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa probabilitas sebesar $0.0000 < \text{taraf signifikansi } 5\%$, artinya H_0 ditolak, sehingga model yang dipilih adalah *Fixed effect* model.

C.2. Estimasi *Fixed effect* model.

Pengujian koefisien regresi digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, dan tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap variabel dependen ketimpangan pendapatan.

Berikut hasil estimasi dari *Fixed effect* model:

Variable	Coefficient	t-Statistic	Prob.	Kesimpulan
JP	6.88E-07	4.628557	0.0000	Signifikan
LPDRB	0.010399	2.859592	0.0048	Signifikan
TPAK	0.000772	0.664607	0.5072	Tidak signifikan
C	-0.436868	-2.389215	0.0180	Signifikan

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat disusun persamaan regresi data panel dengan metode *fixed effect* model sebagai berikut:

$$IG = -0.436868 + 0,000000688 (JPit) + 0.010399 (LPDRBit) + 0.000772 (TPAKit) + eit$$

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat diinterpretasikan secara ekonomi sebagai berikut:

- a. Koefisien dari jumlah penduduk sebesar 0,000000688 dengan nilai probabilitas sebesar 0.0000. Nilai tersebut dapat diartikan bahwa jumlah penduduk berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa

Tengah secara signifikan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tinggi atau rendahnya jumlah penduduk mempengaruhi tingkat ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah.

b. Koefisien laju pertumbuhan produk domestik bruto (PDRB) diperoleh sebesar 0.010399 dengan probabilitas sebesar 0.0048. Nilai tersebut dapat diartikan bahwa laju pertumbuhan produk domestik bruto berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tinggi atau rendahnya laju PDRB berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah.

c. Koefisien tingkat partisipasi angkatan kerja diperoleh sebesar 0.000772 dengan probabilitas sebesar 0.5072. Nilai tersebut dapat diartikan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tinggi atau rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja tidak berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah.

C.3. Pengujian hipotesis

a. Uji F

Uji F digunakan untuk menguji apakah variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Uji F dilakukan dengan cara membandingkan nilai probabilitas F statistic dengan $\alpha = 5\%$ (0,05). Apabila nilai

probabilitas statistik $< \alpha = 5\%$ (0,05), maka variabel jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat partisipasi angkatan kerja secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel ketimpangan distribusi pendapatan. Hasil uji F sebagai berikut:

Keterangan	Nilai
Prob(F-statistic)	0.000000

Dari hasil uji F diperoleh nilai probabilitas F statistic sebesar $0,000000 < \alpha = 0,05$, maka variabel jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat partisipasi angkatan kerja secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel ketimpangan distribusi pendapatan.

b. Uji t

Uji t digunakan untuk melihat apakah variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Parameter yang digunakan adalah suatu variabel dikatakan signifikan jika nilai t hitung lebih besar dari nilai t table atau nilai t statistiknya lebih besar dari 0,05.

Berdasarkan hasil perhitungan yang ditunjukkan pada tabel dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

Hasil uji t pada pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 (5%), diperoleh nilai t hitung sebesar 2.859592 dan signifikansi sebesar 0.0048, koefisien regresi sebesar 0.010399. Dengan demikian nilai signifikansi t hitung lebih kecil dari 0,05, hal ini menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap

ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah periode 2010-2015. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan terbukti.

Hasil uji t pada tingkat partisipasi angkatan kerja dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 (5%), diperoleh nilai t hitung sebesar 0.664607 dan signifikansi sebesar 0.5072, koefisien regresi sebesar 0.000772. Dengan demikian nilai signifikansi t hitung lebih besar dari 0,05, hal ini menunjukkan bahwa variabel tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah periode 2010-2015. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama yang menyatakan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan tidak terbukti.

Hasil uji t pada jumlah penduduk dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 (5%), dan koefisien regresi sebesar diperoleh nilai t hitung sebesar 4.628557 dan signifikansi sebesar 0.0000, koefisien regresi sebesar 0,000000688. Dengan demikian nilai signifikansi t hitung lebih kecil dari 0,05, hal ini menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah periode 2010-2015. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama yang menyatakan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan terbukti.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel bebas secara statistik. Nilai R^2 hasil regresi dalam penelitian ini sebesar 0.502100. dengan hasil tersebut maka variabel dependen dapat dijelaskan sebesar 50% oleh variabel-variabel dependen dalam penelitian ini, sedangkan sisanya sebesar 50% dijelaskan dengan variabel lain.

D. Analisis Regresi Data Model (Ketimpangan Tinggi)

D.1. Uji Spesifikasi Model

a. Uji *Chow Test*

Metode ini untuk memilih antara *common effect model* atau *fixed effect model*. Dengan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : *common effect mode*

H_1 : *fixed effect model*

Berdasarkan hasil estimasi *common effect mode* dan *fixed effect model* didapatkan F statistik sebagai berikut:

Tabel 4.10 Uji *Chow Test*

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2.199829	(24,112)	0.0031
Cross-section Chi-square	54.069239	24	0.0004

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai probabilitas sebesar $0,0004 <$ taraf signifikan 5% artinya H_0 ditolak, sehingga model yang dipilih adalah *Fixed Effect Model*.

b. Uji Hausman Test

Uji Hausman Test digunakan untuk memilih antara *random effect* atau *fixed effect*. Hipotesis dalam uji ini adalah:

H_0 : *random effect* model

H_1 : *Fixed effect* model

Berdasarkan hasil estimasi *random effect* model dan *random effect* model, diperoleh Fstatistik sebagai berikut:

Tabel 4.11 Uji Hausman Test

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	11.466234	3	0.0095

Sumber: Lampiran: 4

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa probabilitas sebesar $0.0095 <$ taraf signifikansi 5%, artinya H_0 ditolak, sehingga model yang dipilih adalah *Fixed effect* model.

D.2. Estimasi *Fixed effect* model.

Pengujian koefisien regresi digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, dan tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap variabel dependen ketimpangan pendapatan. Berikut hasil estimasi dari *Fixed effect* model:

Variable	Coefficient	t-Statistic	Prob.	Kesimpulan
JP	5.71E-07	2.929361	0.0041	Signifikan
LPDRB	0.007437	1.737738	0.0850	Tidak signifikan
TPAK	-0.000322	-0.199259	0.8424	Tidak signifikan
C	-0.181223	-0.780366	0.4368	Tidak signifikan

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat disusun persamaan regresi data panel dengan metode *fixed effect* model sebagai berikut:

$$IG = -0.181223 + 0,000000571 (JPit) + 0.007437 (LPDRBit) - 0.000322 (TPAKit) + eit$$

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat diinterpretasikan secara ekonomi sebagai berikut:

- a. Koefisien dari jumlah penduduk sebesar 0,000000571 dengan nilai probabilitas sebesar 0.0041. Nilai tersebut dapat diartikan bahwa jumlah penduduk berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah secara signifikan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tinggi atau rendahnya jumlah penduduk mempengaruhi tingkat ketimpangan pendapatan tinggi dihitung secara relatif di Provinsi Jawa Tengah.
- b. Koefisien laju pertumbuhan produk domestik bruto (PDRB) diperoleh sebesar 0.007437 dengan probabilitas sebesar 0.0850. Nilai tersebut dapat diartikan bahwa laju pertumbuhan produk domestik bruto tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi

Jawa Tengah. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tinggi atau rendahnya laju PDRB tidak berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan pendapatan tinggi dihitung secara relatif di Provinsi Jawa Tengah.

c. Koefisien tingkat partisipasi angkatan kerja diperoleh sebesar 0.000322 dengan probabilitas sebesar 0.8424. Nilai tersebut dapat diartikan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tinggi atau rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja tidak berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan pendapatan tinggi dihitung secara relatif di Provinsi Jawa Tengah.

D.3. Pengujian hipotesis

a. Uji F

Uji F digunakan untuk menguji apakah variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Uji F dilakukan dengan cara membandingkan nilai probabilitas F statistic dengan $\alpha = 5\%$ (0,05). Apabila nilai probabilitas statistik $< \alpha = 5\%$ (0,05), maka variabel jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat partisipasi angkatan kerja secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel ketimpangan distribusi pendapatan. Hasil uji F sebagai berikut:

Keterangan	Nilai
Prob(F-statistic)	0.001176

Dari hasil uji F diperoleh nilai probabilitas F statistic sebesar $0,001176 < \alpha = 0,05$, maka variabel jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat partisipasi angkatan kerja secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel ketimpangan distribusi pendapatan tinggi yang dihitung secara relatif.

b. Uji t

Uji t digunakan untuk melihat apakah variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Parameter yang digunakan adalah suatu variabel dikatakan signifikan jika nilai t hitung lebih besar dari nilai t table atau nilai t statistiknya lebih besar dari 0,05.

Berdasarkan hasil perhitungan yang ditunjukkan pada tabel ? dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

Hasil uji t pada pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 (5%), diperoleh nilai t hitung sebesar 1.737738 dan signifikansi sebesar 0.0850, koefisien regresi sebesar 0.007437. Dengan demikian nilai signifikansi t hitung lebih besar dari 0,05, hal ini menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan tinggi secara relatif di Provinsi Jawa Tengah periode 2010-2015. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan tidak terbukti.

Hasil uji t pada tingkat partisipasi angkatan kerja dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 (5%), diperoleh nilai t hitung sebesar -0.199259 dan signifikansi sebesar 0.8424, koefisien regresi sebesar -0.000322. Dengan demikian nilai signifikansi t hitung lebih besar dari 0,05, hal ini menunjukkan bahwa variabel tingkat partisipasi angkatan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan tinggi secara relatif di Provinsi Jawa Tengah periode 2010-2015. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama yang menyatakan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan tidak terbukti.

Hasil uji t pada jumlah penduduk dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 (5%), dan koefisien regresi sebesar diperoleh nilai t hitung sebesar 2.929361 dan signifikansi sebesar 0.0041, koefisien regresi sebesar 0,000000571. Dengan demikian nilai signifikansi t hitung lebih kecil dari 0,05, hal ini menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan tinggi relatif di Provinsi Jawa Tengah periode 2010-2015. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama yang menyatakan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan terbukti.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel bebas secara statistik. Nilai R^2 hasil regresi dalam penelitian ini sebesar 0.358240. dengan hasil tersebut maka variabel

dependen dapat dijelaskan sebesar 35% oleh variabel-variabel dependen dalam penelitian ini, sedangkan sisanya sebesar 65% dijelaskan dengan variabel lain.

E. Analisis Regresi Data Model (Ketimpangan Rendah)

E.1. Uji Spesifikasi Model

a. Uji *Chow Test*

Metode ini untuk memilih antara *common effect model* atau *fixed effect model*. Dengan hipotesis sebagai berikut:

H0: *common effect mode*

H1: *fixed effect model*

Berdasarkan hasil estimasi *common effect mode* dan *fixed effect model* didapatkan F statistik sebagai berikut:

Tabel 4.11 Uji *Chow Test*

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	3.709800	(11,57)	0.0005
Cross-section Chi-square	38.876620	11	0.0001

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai probabilitas sebesar $0,0001 < \text{taraf signifikan } 5\%$ artinya H0 ditolak, sehingga model yang dipilih adalah *Fixed Effect Model*.

b. Uji *Hausman Test*

Uji Hausman Test digunakan untuk memilih antara *random effect* atau *fixed effect*. Hipotesis dalam uji ini adalah:

H0: *random effect model*

H1: *Fixed effect* model

Berdasarkan hasil estimasi *random effect* model dan *random effect* model, diperoleh Fstatistik sebagai berikut:

Tabel 4.11 Uji *Hausman* Test

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	16.556432	3	0.0009

Sumber: Lampiran: 4

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa probabilitas sebesar $0.0009 < \text{taraf signifikansi } 5\%$, artinya H_0 ditolak, sehingga model yang dipilih adalah *Fixed effect* model.

c. Estimasi *Fixed effect* model.

Pengujian koefisien regresi digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, dan tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap variabel dependen ketimpangan pendapatan. Berikut hasil estimasi dari *Fixed effect* model:

Variabel	Coefficient	t-Statistic	Prob.	Kesimpulan
JP	8.95E-07	3.632506	0.0006	Signifikan
LPDRB	0.019344	2.386367	0.0204	Signifikan
TPAK	0.001839	1.067361	0.2903	Tidak signifikan
C	-0.910147	-2.812845	0.0067	Signifikan

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat disusun persamaan regresi data panel dengan metode *fixed effect* model sebagai berikut:

$$IG = -0.910147 + 0,000000895 (JPit) + 0.019344 (LPDRBit) - 0.001839 (TPAKit) + eit$$

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat diinterpretasikan secara ekonomi sebagai berikut:

- a. Koefisien dari jumlah penduduk sebesar 0,000000895 dengan nilai probabilitas sebesar 0.0006. Nilai tersebut dapat diartikan bahwa jumlah penduduk berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah secara signifikan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tinggi atau rendahnya jumlah penduduk mempengaruhi tingkat ketimpangan pendapatan rendah dihitung secara relatif di Provinsi Jawa Tengah.
- b. Koefisien laju pertumbuhan produk domestik bruto (PDRB) diperoleh sebesar 0.019344 dengan probabilitas sebesar 0.0204. Nilai tersebut dapat diartikan bahwa laju pertumbuhan produk domestik bruto berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tinggi atau rendahnya laju PDRB berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan pendapatan rendah dihitung secara relatif di Provinsi Jawa Tengah.
- c. Koefisien tingkat partisipasi angkatan kerja diperoleh sebesar 0.001839 dengan probabilitas sebesar 0.2903. Nilai tersebut dapat diartikan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tinggi atau rendahnya tingkat partisipasi angkatan

kerja tidak berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan pendapatan rendah dihitung secara relatif di Provinsi Jawa Tengah.

E.2. Pengujian hipotesis

a. Uji F

Uji F digunakan untuk menguji apakah variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Uji F dilakukan dengan cara membandingkan nilai probabilitas F statistic dengan $\alpha = 5\%$ (0,05). Apabila nilai probabilitas statistik $< \alpha = 5\%$ (0,05), maka variabel jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat partisipasi angkatan kerja secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel ketimpangan distribusi pendapatan. Hasil uji F sebagai berikut:

Keterangan	Nilai
Prob(F-statistic)	0.000204

Dari hasil uji F diperoleh nilai probabilitas F statistic sebesar $0,000204 < \alpha = 0,05$, maka variabel jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat partisipasi angkatan kerja secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel ketimpangan distribusi pendapatan rendah yang dihitung secara relatif.

b. Uji t

Uji t digunakan untuk melihat apakah variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Parameter yang digunakan adalah suatu variabel dikatakan signifikan jika nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel atau nilai t statistiknya lebih besar dari 0,05.

Berdasarkan hasil perhitungan yang ditunjukkan pada tabel dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

Hasil uji t pada pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 (5%), diperoleh nilai t hitung sebesar 2.386367 dan signifikansi sebesar 0.0204, koefisien regresi sebesar 0.019344. Dengan demikian nilai signifikansi t hitung lebih kecil dari 0,05, hal ini menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan rendah secara relatif di Provinsi Jawa Tengah periode 2010-2015. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan terbukti.

Hasil uji t pada tingkat partisipasi angkatan kerja dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 (5%), diperoleh nilai t hitung sebesar 1.067361 dan signifikansi sebesar 0.2903, koefisien regresi sebesar 0.001839. Dengan demikian nilai signifikansi t hitung lebih besar dari 0,05, hal ini menunjukkan bahwa variabel tingkat partisipasi angkatan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan rendah secara relatif di Provinsi Jawa Tengah periode 2010-2015. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama yang menyatakan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan tidak terbukti.

Hasil uji t pada jumlah penduduk dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 (5%), dan koefisien regresi sebesar diperoleh nilai t hitung sebesar 3.632506 dan signifikansi sebesar 0.0006, koefisien regresi sebesar 0,000000895.

Dengan demikian nilai signifikansi t hitung lebih kecil dari 0,05, hal ini menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan rendah relatif di Provinsi Jawa Tengah periode 2010-2015. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama yang menyatakan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan terbukti.

d. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel bebas secara statistik. Nilai R^2 hasil regresi dalam penelitian ini sebesar 0.477706. dengan hasil tersebut maka variabel dependen dapat dijelaskan sebesar 47% oleh variabel-variabel dependen dalam penelitian ini, sedangkan sisanya sebesar 53% dijelaskan dengan variabel lain.

F. Pembahasan

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa estimasi yang dihasilkan cukup baik untuk menjelaskan ketimpangan pendapatan antar Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2010/2015. Terdapat dua variabel yang signifikan terhadap ketimpangan, yaitu pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk. Sedangkan satu variabel sisanya tidak berpengaruh terhadap ketimpangan, yaitu tingkat partisipasi angkatan kerja. Berikut adalah tabel ringkasan perhitungan olah data:

Tabel 4.12 Ringkasan Hasil Olah Data

Variabel Y	Variabel X		
	Jumlah penduduk	Partisipasi angkatan kerja	Pertumbuhan ekonomi
Ketimpangan menyeluruh	Signifikan positif	Tidak signifikan	Signifikan positif
Ketimpangan tinggi	Signifikan positif	Tidak signifikan	Tidak signifikan
Ketimpangan rendah	Signifikan positif	Tidak signifikan	Signifikan positif

1. Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Hipotesis pertama (H1) dalam penelitian ini adalah jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Menurut hasil penelitian ini, pada tingkat ketimpangan secara menyeluruh, mempunyai nilai probabilitas sebesar 0,0000 atau kurang dari 0,05 dimana artinya jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Sedangkan pada tingkat ketimpangan tinggi relatif, jumlah penduduk mempunyai nilai probabilitas sebesar 0,0041 atau kurang dari 0,05 dimana artinya jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap tingkat ketimpangan tinggi relatif. Pada tingkat ketimpangan rendah relatif, jumlah penduduk mempunyai nilai probabilitas sebesar 0,0006 atau kurang dari 0,05 dimana artinya jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan rendah secara relatif. Maka dari itu:

1. Ketimpangan menyeluruh : H1 diterima
2. Ketimpangan tinggi : H1.1 diterima

3. Ketimpangan rendah : H1.2 diterima

Jumlah penduduk yang berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, baik itu ketimpangan pendapatan secara menyeluruh, ketimpangan pendapatan rendah, maupun tinggi secara relatif. Artinya, tinggi rendahnya nilai jumlah penduduk berpengaruh terhadap ketimpangan.

Penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya oleh Ani Nurlaili (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Pulau Jawa”, menyatakan bahwa populasi jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap ketimpangan di Pulau Jawa. Senada dengan penelitian Ani Nurlaili, Maimum Musfidar (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Sulawesi Selatan tahun 2001-2010”, menyatakan bahwa variabel jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan.

2. Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Hipotesis pertama (H2) dalam penelitian ini adalah tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Menurut hasil penelitian ini, pada tingkat ketimpangan secara menyeluruh, mempunyai nilai probabilitas sebesar 0,5072 atau lebih dari 0,05 dimana artinya partisipasi angkatan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Sedangkan pada tingkat ketimpangan tinggi relatif, partisipasi angkatan kerja mempunyai nilai probabilitas sebesar 0,0850 atau lebih dari 0,05 dimana artinya partisipasi angkatan

kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat ketimpangan tinggi relatif. Pada tingkat ketimpangan rendah relatif, partisipasi angkatan kerja mempunyai nilai probabilitas sebesar 0,2903 atau lebih dari 0,05 dimana artinya partisipasi angkatan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan rendah secara relatif. Maka dari itu:

1. Ketimpangan menyeluruh : H2 ditolak
2. Ketimpangan tinggi : H2.1 ditolak
3. Ketimpangan rendah : H2.2 ditolak

Tingkat partisipasi angkatan kerja yang tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, baik itu ketimpangan pendapatan secara menyeluruh, ketimpangan pendapatan rendah, dan tinggi secara relatif. Artinya, tinggi rendahnya nilai tingkat partisipasi angkatan kerja tidak berpengaruh terhadap ketimpangan.

Penelitian ini didukung oleh teori Kuznet (1995) yang menyatakan bahwa pada awalnya berdirinya pabrik dan industri akan berpengaruh pada jumlah partisipasi angkatan kerja dan selanjutnya akan berdampak pada memburuknya distribusi pendapatan. Tetapi seiring berjalannya waktu, pemerataan distribusi pendapatan akan membaik dengan sendirinya (Arsyad, 2011: 15).

3. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Hipotesis pertama (H3) dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Menurut hasil

penelitian ini, pada tingkat ketimpangan secara menyeluruh, mempunyai nilai probabilitas sebesar 0,0048 atau kurang dari 0,05 dimana artinya pertumbuhan berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Sedangkan pada tingkat ketimpangan tinggi relatif, pertumbuhan ekonomi mempunyai nilai probabilitas sebesar 0,0850 atau lebih dari 0,05 dimana artinya pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat ketimpangan tinggi relatif. Pada tingkat ketimpangan rendah relatif, pertumbuhan ekonomi mempunyai nilai probabilitas sebesar 0,0204 atau kurang dari 0,05 dimana artinya pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan rendah secara relatif. Maka dari itu:

Ketimpangan menyeluruh : H3 diterima

Ketimpangan tinggi : H3.1 ditolak

Ketimpangan rendah : H3.2 diterima

Pertumbuhan ekonomi yang berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, baik itu ketimpangan pendapatan secara menyeluruh maupun ketimpangan pendapatan rendah secara relatif. Artinya, tinggi rendahnya nilai pertumbuhan pendapatan berpengaruh terhadap ketimpangan secara menyeluruh maupun ketimpangan rendah relatif. Sedangkan pada ketimpangan tinggi relatif, pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan tinggi relatif.

Penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya oleh Diah Pradnyadewi T dan Ida bagus (2017) dengan hasil penelitian menyatakan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan.

4. Pandangan Ekonomi Syariah terhadap hasil penelitian

Hasil regresi data panel menunjukkan variabel independen jumlah penduduk merupakan faktor yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan, baik itu secara menyeluruh, tinggi, maupun rendah secara relatif. Hasil analisis data dapat dinyatakan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan pada ketimpangan pendapatan secara menyeluruh dan rendah secara relatif, sedangkan pada ketimpangan tinggi relatif, pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan. Untuk variabel tingkat partisipasi angkatan kerja, variabel tersebut tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan baik itu secara menyeluruh, tinggi, maupun rendah secara relatif.

Salah satu bidang terpenting dalam hal ekonomi adalah distribusi pendapatan. Pembahasan tentang distribusi pendapatan menjelaskan tentang bagaimana pembagian atau distribusi kekayaan oleh para pelaku ekonomi. Dalam hal ini distribusi pendapatan erat kaitannya dengan faktor-faktor produksi seperti tanah, modal, tenaga kerja dan manajemen. Ketika membahas tenaga kerja, disana dibahas hal mengenai system gaji tenaga kerja. Dalam beberapa kitab Hadis terdapat banyak sekali peraturan tentang sistem ketenagakerjaan. Inti dari aturan tersebut yaitu Islam sangat menghargai keringat yang keluar dari para pekerja dan juga kesejahteraannya. Akan tetapi Islam juga mengharuskan para pekerja bersungguh-sungguh dalam

menjalankan pekerjaannya. Selain mendapat gaji, mereka juga mendapat pahala dari ALLAH SWT (Fauziah & Riyadi, 2014).

Angkatan kerja yang baik dan berkualitas diyakini akan dapat membangun suatu fondasi yang kokoh dalam pembangunan ekonomi yang berkesinambungan. Pengurangan pengangguran akan dapat mendorong pemerataan pendapatan. Pemerataan lebih lanjut diperkuat oleh kebijakan untuk menggunakan padat karya dalam menjalankan suatu usaha (Chapra, 2000).

Dari sekian banyak cara untuk membangkitkan kesejahteraan umat, membutuhkan semangat pendistribusian harta seorang muslim terhadap orang lain. Hal tersebut bisa terealisasi jika seorang muslim seimbang dalam pengeluaran dan pendapatan. Wujud dari keadilan distribusi tersebut diwujudkan dalam mengalirnya saluran-saluran distribusi harta umat dengan berbagai macam aktivitas, seperti: zakat, sedekah, qard hasan, infak, dan lain-lain. Hal tersebut sesuai dengan tujuan kebijakan ekonomi yang dikemukakan oleh Monzer Kahf, yaitu: (1) maksimalisasi tingkat pemanfaatan sumber daya (2) minimalisasi kesenjangan distribusi pendapatan (3) pelaksanaan aturan-aturan permainan oleh alat-alat ekonomi (Fauziah & Riyadi, 2014).

Dari berbagai makna adil dan keadilan, dapat dipahami bahwa keadilan dalam distribusi merupakan suatu kondisi yang tidak memihak pada suatu golongan tertentu pada struktur ekonomi, sehingga kekayaan tidak menumpuk pada sebagian kecil masyarakat. Keadilan distribusi menjamin terciptanya pembagian yang adil, sehingga memberikan kontribusi pada kualitas hidup yang baik (Ghofur, 2013).